

KELOMPOK KERJA GURU

Pelatihan Daring Guru di Semanu



KR-Endar Widodo

Pelatihan Daring KKG Guru Kelas di Semanu.

SEMANU (KR) - Melaksanakan kebijakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul dengan adanya pandemi Covid-19, Kelompok Kerja Guru (KKG) Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan (Korwilbidik) Kecamatan Semanu menyelenggarakan pelatihan daring KKG Guru-Guru Kelas IV-VI.

Daring KKG dibuka oleh Kasi Kurikulum Bidang Sekolah Dasar (SD) Disdikpora Asbani SPd MPd dan dihadiri juga Kepala Korwilbidik Kecamatan Semanu Drs Bambang Eka Sri Purwanta SH MPd dan 94 guru kelas di tempat masing-masing. "Pelatihan da-

ring KKG ini agar pada masa pandemi Korona guru tetap dapat melakukan pembelajaran kepada anak-anak, sekaligus untuk meningkatkan profesionalitas guru dalam penggunaan teknologi informasi," kata Koordinator Pengawas Korwilbidik Kecamatan Semanu Endang Dwi Rukmi Endang S SPd MM, Rabu (6/5).

Pelatihan yang akan berlangsung selama 9 hari, tetapi tidak berurutan, kata Ketua Panitia Penyelenggara Warsono M MPd, dengan materi Kebijakan Pendidikan Disdikpora Gunungkidul yang disampaikan oleh Asbani SPd MPd, Aplikasi Zoom, aplikasi webex, google form oleh En-

ang Dwi Rukmini SPd MM dan Kaidah penyusunan soal penilaian tugas peserta oleh pengawas SD Jumiarti SPd MPd.

Menurut ketua penyelenggara, dengan kebijakan pembelajaran di rumah (DBR) dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu daring (dalam jaringan), semi daring dan offline. Hal ini bergantung kesiapan guru dan siswa. Pelatihan pengembangan pembelajaran daring untuk guru kelas agar para guru yang belum terbiasa menggunakan daring menjadi terampil menggunakannya terutama untuk guru yang kondisi siswanya memiliki HP Android, sedangkan untuk guru yang siswanya belum memiliki HP Android tetap mengikuti pelatihan namun pelaksanaannya BDR semi daring dan atau offline.

"Keterampilan guru dalam pembelajaran daring tidak hanya terbatas pada masa pandemi Korona. Untuk selanjutnya model ini dapat menjadi salah satu pilihan komunikasi antara guru dengan guru, guru dengan siswa dan siswa dengan siswa," tambahnya.

(Ewi)-d

JARING PENGAMAN COVID-19 DI KULONPROGO
Kemensos Siap Distribusikan 'BST'

WATES (KR) - Bantuan Sosial Tunai (BST) siap didistribusikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kulonprogo. Bantuan jaring pengaman sosial penanganan wabah Covid-19 dari Kementerian Sosial (Kemensos) disalurkan melalui kantor pos dan Himbara (Himpunan Bank-Bank Milik Negara).

Kesiapan pendistribusian BST Rp 600.000 perbulan perkepala keluarga (KK) selama tiga bulan tersebut secara simbolis diserahkan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (P3A) Kulonprogo Y Irianto kepada salah satu PKM di Kantor Pos Wates, Rabu (6/5).

"Bagi KPM BST yang tidak memiliki nomor rekening di salah satu bank Himbara akan disalurkan melalui kantor pos. Ada yang akan diantar ke alamat penerima bantuan, lewat loket kantor pos atau loket komunitas yang ditentukan oleh kantor pos," ujar Y Irianto.

Menurutnya, verifikasi dan sinkronisasi data di Dinsos P3A Kulonprogo sudah selesai. KPM BST sebanyak 20.158 KK. Adapun bantuan yang siap disalurkan kantor pos sekitar 17.643 KK.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos P3A Kulonprogo, Abdul Kahar menjelaskan sekitar 2.515 KPM telah

memiliki nomor rekening di salah satu Himbara. BST akan ditranfer ke nomor rekening atas nama penerima ke salah satu Himbara yang ditunjuk.

"Kemensos menargetkan penyaluran bantuan dapat diselesaikan dalam satu minggu. Optimis untuk penyaluran BST di Kulonprogo dapat diselesaikan sesuai target," jelas Abdul Kahar.

Menurutnya, pihak kantor pos segera mengeluarkan jadwal penyaluran, baik yang akan diantar ke alamat penerima, ke loket kantor pos atau loket komunitas. Mekanisme penyaluran melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Di konfirmasi terkait jaring pengaman sosial terhadap KPM sembako tambahan, katanya, sudah pada tahap penyerahan Kartu Keluarga Sejahtera dan pembukaan nomor rekening bank. Keluarga yang menerima program sembako tambahan di Kulonprogo sekitar 7.479 KK.

KPM sembako tambahan dari Kemensos akan menerima bahan kebutuhan pokok Rp 200.000 perbulan selama lima bulan. "Untuk program sembako tambahan saat ini sedang pembagian KKS dan pembukaan nomor rekening," tambah Abdul Kahar.

(Ras)-d

PERGERAKAN COVID-19 GUNUNGKIDUL

Tambah 10 Positif, Sebagian Besar Klaster Wonosari

WONOSARI (KR) - Pergerakan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Gunungkidul melonjak dan bertambah 10 orang, Kamis (7/5). Dengan bertambahnya jumlah positif maka total kumulatif penderita positif Covid-19 di Gunungkidul menjadi 24 kasus. Dengan jumlah terbanyak di Kecamatan Wonosari dan hal ini menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 di Kabupaten Gunungkidul.

"Tambahan penyebaran terbaru di Kecamatan Ngeunden dan Purwosari yang kini sedang kami lacak dan telusuri untuk trakingnya," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, dr Dewi Irawaty MKes Kamis (7/5). Dari jumlah kumulatif tersebut sebanyak 5 orang dinyatakan sembuh dan 19 masih dirawat di sejumlah rumah sakit di DIY.

Adapun ke-10 pasien baru tersebut saat ini segera akan dirawat di RSUD Wonosari, RS Bethesda Yogyakarta, dan RSUD Panem-

Data Covid-19 di Gunungkidul

Kamis, 7 Mei 2020

- Jumlah PDP : 77
- Diambil Spesm : 92
- Positif : 24
- Negatif : 56
- Spesm Dlm Proses : 12
- PDP masih dirawat : 4
- PDP Dirujuk : -
- ODP : 1.029
- ODP masih dirawat : 1
- PDP meninggal : 17
- Jumlah konfirmasi positif dlm perawatan: 5
- Konfirmasi positif covid-19 sembuh: 4

Sumber: Dinkes Gunungkidul

KR-BMP /GRAFIS JOS

diawat 4 orang. Pihaknya juga melakukan penelusuran terhadap kasus reaktif rapid test dari supermarket di Sleman. Mereka itu melakukan riwayat kontak ka-

rena berkaitan dengan pekerjaan. Khusus untuk RSUD Wonosari saat itu merawat 8 orang pasien Covid-19, dari total 15 ruangan isolasi yang disediakan. (Bmp)-d

RATUSAN KEPALA DESA GERUDUK DPRD

Persoalkan Pendataan Bansos Covid-19

WONOSARI (KR) - Ratusan kepala desa di Gunungkidul mendatangi gedung DPRD Gunungkidul mende sak Pemkab Gunungkidul segera memberikan data Jaring Pengaman Sosial Korona untuk menghindari terjadinya keresahan masyarakat akibat ketidaktepatan sasaran penerima manfaat.

Koordinator Forum Komunikasi Kepala Desa se-Gunungkidul Hery Yulianto mengatakan, saat ini pihaknya sudah mulai mendata warga calon penerima bansos yang menggunakan dana desa. "Ironisnya, seluruh data penerima manfaat para kepala desa tidak tahu karena tidak dilibatkan dalam pendataan, padahal pemerintah desa yang paling dekat dengan keadaan masyarakat," katanya saat audiensi di DPRD Gunungkidul, Rabu (6/5) malam.

Saat ini hampir semua masyarakat mengaku terkena dampak korona akibat kehilangan pekerjaan dan usahanya terganggu akibat pandemi Covid-19. Padahal pemerintah desa meyakini tidak semua warga akan mendapatkan dana Bansos dan tentu disesuaikan dengan ketentuan yang ada.

Dalam audiensi juga sempat menanyakan keberadaan Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dan berusaha mengkonfirmasi lantaran tidak memberikan kejelasan kepada pemerintah desa terkait dengan warga yang melakukan isolasi mandiri. Padahal seluruh desa di Gunungkidul sudah menerima kedatangan pemudik, tetapi saat isolasi mandiri dilakukan tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab dan menanggung logistik dan kebutuhan permakanan selama mereka diisolasi. "Kami butuh jawaban dan solusi terkait kedua hal tersebut," imbuhnya.

Janji Dipertemukan

Ketua DPRD Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih SE berjanji akan mempertemukan para kepala desa tersebut dengan bupati, termasuk seluruh jajaran gugus tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Gunungkidul. Pihaknya juga akan meminta Pemkab Gunungkidul dapat membuat dan menjelaskan kriteria calon penerima manfaat yang tentunya harus melibatkan pemerintah desa. Hal tersebut sangat penting dilakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk menghindari terjadi-

nya keresahan masyarakat. Sedangkan terkait isolasi mandiri, pihaknya juga akan membuat catatan khusus. Untuk itu Pemkab segera memberikan anggaran permakanan bagi desa desa yang membuat rumah isolasi mandiri desa. "Jangan hanya disuport untuk membuat rumah isolasi, namun diberikan anggaran untuk kebutuhan makanan warga yang terisolasi," ucapnya.

Terpisah Kepala Dinas Sosial Gunungkidul Dra Siwi Irianti menyatakan saat ini data yang digunakan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun demikian data tersebut memang masih belum sesuai dengan harapan. Sebenarnya data akurat terdapat dalam dokumen Sistem Informasi Desa (SID). Data yang relevan dan sesuai dengan kondisi di desa adalah terdapat dalam dokumen SID. Tetapi ketika data sesuai SID dikirim pusat ternyata data tersebut tidak bisa digunakan dan hal inilah yang kemudian menjadi kendala dalam penentuan syarat dan kriteria calon penerima manfaat. Tetapi pihaknya juga berjanji akan melakukan berbagai langkah untuk upaya penyalarsan data. (Bmp)-d

PANSUS SELESAIKAN REKOMENDASI KEMUDAHAN INVESTASI

DPRD Desak Pemkab Tinjau Perda No 21/2012

PENGASIH (KR) - Sepuluh poin rekomendasi telah dituntaskan oleh Panitia Khusus (Pansus) kemudahan investasi bentuk DPRD Kulonprogo, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Selasa (5/5). Selanjutnya 10 poin rekomendasi tersebut segera diserahkan ke bupati.

Wakil Ketua Pansus Kemudahan Investasi, H Priyo Santoso SH meminta Pemkab segera menindaklanjuti terhadap 10 poin rekomendasi tersebut. Poin-poin rekomendasi meliputi desakan kepada Pemkab Kulonprogo untuk meninjau kembali Peraturan Daerah No 21/2012 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal serta peraturan pelaksanaannya agar disesuaikan dengan PP No 24/2019 tentang pemberian Insentif dan kemudahan investasi di daerah.

"Pemkab diminta mengoptimalkan tugas tim percepatan investasi dan merangkul seluruh stakeholders dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan. Kami meminta

pula Pemkab memaksimalkan potensi BUMD untuk menarik investor serta meninjau kembali perda tentang RTRW yang menyangkut potensi daerah dan perluasan zona kawasan industri dalam rangka mengurangi potensi kenaikan harga tanah," kata Priyo usai rapat.

Poin lainnya adalah desakan kepada Dinas Penanamam Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMP) Kulonprogo supaya menyusun program prioritas seperti promosi, kemudahan perizinan, dan pemetaan wilayah investasi. Perlu memberi kemudahan dalam berinvestasi kepada para penanam modal sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

Rekomendasi lainnya perlu adanya optimalisasi berupa *improvement* prosedur investasi serta revitalisasi dinas terkait dari sisi perangkat sistem pengendalian, yaitu berupa pantauan pengawasan terhadap investasi.

Pemkab perlu membentuk tim pengelola kawasan industri yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan

suatu kawasan industri. "Pansus menugaskan Komisi 2 mengawal tindak lanjut rekomendasi kemudahan investasi. Nantinya dilaporkan secara periodik terkait hasil pengawasan kepada pimpinan DPRD sebagai evaluasi pelaksanaan atau progres yang dilaksanakan Pemkab," ujar Priyo yang berharap rekomendasi ini menjadi kontribusi pemikiran yang konkret DPRD dalam upaya perumusan kebijakan kemudahan investasi di Kulonprogo, dan pada akhirnya dapat menarik minat investor menanamkan modalnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati SE mengemukakan, berkas rekomendasi kemudahan investasi ini segera disampaikan ke Bupati Kulonprogo. "Saat ini kemudahan investasi di Kulonprogo diperlukan dengan sudah beroperasi Bandara Internasional Yogyakarta. Adanya rekomendasi ini, Pemkab bisa mengimplementasikan sepuluh poin di dalam *draft* rekomendasi agar menjadi acuan dalam penentuan kebijakan," tandas Akhid. (Wid)-d

DIDUGA PENYALURAN BLT TAK TEPAT SASARAN

DPRD DIY: Awasi Dana Desa

GALUR (KR) - Komisi A DPRD DIY mengajak masyarakat mengawasi pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan virus Korona agar pelaksanaannya sesuai aturan sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Demi tercapainya tujuan tersebut maka rombongan wakil rakyat membidangi pemerintahan dan hukum tersebut melakukan monitoring

dan evaluasi (monev) pemanfaatan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Galur Kulonprogo, Rabu (6/5).

"Kami seluruh anggota Komisi A silaturahmi ke Mlati Sleman dan Galur Kabupaten Kulonprogo untuk memastikan dana desa dimanfaatkan secara benar dan tepat sasaran untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak Covid-19, khu-

susnya BLT," kata Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto.

Dikatakan, Komisi A telah menggelar rapat dengan Biro Tapem dan Inspektorat dengan rekomendasi agar pemma membantu mendampingi lurah dalam merencanakan dan mengalokasikan dana desa untuk penanggulangan Covid-19.

"Jumlah dana desa untuk penanggulangan Co-

vid-19 cukup besar, Rp 144.38 miliar secara khusus dialokasikan untuk BLT Dana Desa, dengan sasaran sekitar 80.221 kepala keluarga (KK). Harapan masyarakat dana itu lekas dibagikan kepada yang berhak menerimanya, selaras dengan kartu sembako serta bantuan lainnya. Kami juga mengajak masyarakat mengawasi pemanfaatan dana desa agar pelaksanaan sesuai aturan

dan mencegah korupsi," imbuahnya menambahkan rombongan Komisi A turun ke bawah ingin memastikan penanganan Covid 19 di daerah bisa berjalan lancar.

"Selain pemanfaatan dana desa, hal lain yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah pemanfaatan dana kelurahan di 46 kelurahan. Masyarakat di kelurahan juga harus dijamin mendapatkan hak yang sama

khususnya ketersediaan pangan dan bantuan sembako bagi yang terdampak. Hal lainnya yang harus kita cermati adalah aspek keamanan wilayah dan kedisiplinan masyarakat melakukan *social distancing* juga jaga jarak serta jaga stamina," tuturnya.

Sementara itu beredar informasi adanya laporan yang diterima para pamong kelurahan terkait BLT tidak tepat sasaran.

Bahkan ada yang tidak memenuhi ketentuan.

"Kuat dugaan penyaluran BLT tidak tepat sasaran. *Masak* ada ibu dapat bantuan Rp 600 ribu perbulan dan anaknya ya dapat Rp 600 ribu perbulan, padahal syarat mengambil bantuan pakai KTP Elektronik, sementara yang anak kan belum punya KTP Elektronik," ujar sumber KR yang enggan disebutkan identitasnya. (Rul)-d



Istimewa

Penyerahan bantuan untuk siswa.

KALIBAWANG (KR) - MAN 3 Kulonprogo bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Kapanewon Kalibawang dalam rangka

memperingati Hari Pendidikan Nasional 2020, menyalurkan bantuan untuk siswa. Bantuan diserahkan Kepala Madrasah Moh Fadlil Afif Lc kepada